



**MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : B/ 8 /M.RB.06/2022
Hal : Hasil Evaluasi Pelaksanaan
Reformasi Birokrasi
Tahun 2021

7 Maret 2022

**YTH. BAPAK KEPALA BADAN PEMBINAAN
IDEOLOGI PANCASILA**

DI

JAKARTA

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024, kami telah melakukan evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi pada Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Pelaksanaan evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Perubahan mendasar dari pedoman tersebut adalah penekanan pada hal-hal yang bersifat implementatif, kolaboratif dan analisis yang holistik.

Tujuan evaluasi untuk menilai kemajuan pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam rangka mencapai sasaran, yaitu mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel, serta birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik secara prima. Selain itu, evaluasi ini juga bertujuan untuk memberikan saran perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.

Berdasarkan evaluasi yang telah dilaksanakan, kesimpulan hasil evaluasi adalah sebagai berikut:

1. Indeks Reformasi Birokrasi di Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tahun 2021 adalah **60,15** dengan kategori "B". Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai
			2021
A.	Komponen Pengungkit		
	I. Pemenuhan	20,00	12,50
	II. Hasil Antara Area Perubahan	10,00	5,39
	III. Reform	30,00	13,02
	Total Komponen Pengungkit	60,00	30,91

No.	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai
			2021
B.	Komponen Hasil		
1.	Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10,00	7,20
2.	Kualitas Pelayanan Publik	10,00	8,50
3.	Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas KKN	10,00	8,20
4.	Kinerja Organisasi	10,00	5,34
Total Komponen Hasil		40,00	29,24
Indeks Reformasi Birokrasi (Pengungkit + Hasil)		100,00	60,15

Hasil evaluasi tersebut menunjukkan bahwa Badan Pembinaan Ideologi Pancasila telah berupaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui pelaksanaan reformasi birokrasi.

2. Hasil antara pada Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, telah dilakukan pengukuran oleh instansi *leading sector*, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Hasil Antara	Skala	Nilai	Sumber Data
1.	Sistem Merit	0-400	253,5	Komisi Aparatur Sipil Negara
2.	Kualitas Pengelolaan Aset	0-4	2,69	Kementerian Keuangan
3.	ASN Profesional	0-100	42,41	Badan Kepegawaian Negara
4.	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	1-5	1,42	Kementerian PANRB
5.	Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	0-100	66,67	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia
6.	Kualitas Pengelolaan Anggaran	0-100	91,98	Kementerian Keuangan
7.	Kapabilitas APIP	0-5	1	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
8.	Maturitas SPIP	0-5	2+	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

3. Evaluasi pembangunan reformasi birokrasi yang telah dilakukan merupakan evaluasi pertama yang dilakukan atas Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
4. Selain terkait tindak lanjut, juga perlu memperhatikan beberapa hal yang harus diperhatikan, untuk mengoptimalkan program reformasi birokrasi diantaranya sebagai berikut:
- Pelaksanaan reformasi birokrasi sudah berjalan di tingkat unit kerja meskipun belum signifikan memberikan dampak perubahan. Hal ini dikarenakan manajemen pelaksanaan reformasi birokrasi masih terfokus pada tingkat pusat saja, sehingga hasil dari perbaikan implementasi reformasi birokrasi belum merata dan menyeluruh;
 - Agen perubahan yang dibentuk baik di tingkat lembaga maupun unit kerja belum semua memiliki rencana aksi perubahan yang konkret dan inovatif, sehingga belum mampu menunjukkan hasil nyata dalam menggerakkan perubahan pada lingkup organisasi;

- c. Identifikasi dan pemetaan terhadap peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis belum dilakukan dengan baik, sehingga belum dapat dipastikan kebijakan yang ditetapkan harmonis dengan kebijakan lain;
 - d. Belum sepenuhnya menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 384 tahun 2019 tentang Langkah Strategis dan Konkret Penyederhanaan Birokrasi namun hal tersebut perlu diikuti dengan melakukan penyesuaian pada proses bisnis, *standard operating procedure* (SOP) dan hal-hal lain yang terpengaruh. Sehingga, amanat dari penyederhanaan tersebut untuk mewujudkan birokrasi yang dinamis, lincah (*agile*) dan profesional dapat terwujud;
 - e. Peta proses bisnis belum disusun secara menyeluruh dan evaluasinya belum menjawab kesesuaian aktivitas hubungan kerja antar unit organisasi dengan kinerja. Selain itu, penerapan *e-government* masih dilakukan secara parsial dan belum terintegrasi, sehingga belum signifikan mengungkit perbaikan layanan;
 - f. Proses asesmen belum tuntas dilaksanakan sehingga hasilnya belum dapat digunakan untuk pengembangan karir individu berbasis kompetensi, kemudian perencanaan pengembangan kompetensi pegawai atau *Human Capital Development Plan* (HCDP) sedang berproses. Selain itu, dasar penempatan pegawai untuk suatu jabatan juga belum didasarkan pada pemetaan talenta;
 - g. Perencanaan kinerja hingga ke evaluasi kinerja yang merupakan elemen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) belum terbangun dengan baik;
 - h. Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan sistem pengawasan telah dilakukan, namun hasilnya belum dapat memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas pengawasan; dan
 - i. Upaya peningkatan kualitas pelayanan publik sudah dilaksanakan namun belum didukung dengan proses monitoring dan evaluasi untuk memastikan perbaikan yang ada berdampak maksimal dan berkelanjutan.
5. Terkait komponen hasil, menunjukkan bahwa pada tahun 2021, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila memperoleh nilai yang cukup baik dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen Hasil	Skala	Nilai	Sumber Data
1	Opini BPK	Opini	WTP	Badan Pemeriksa Keuangan
2	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik (IPKP)	0-100	85,00	Kementerian PANRB
3	Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)	0-100	81,97	Survei Penilaian Integritas (SPI) Eksternal oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
4	Survei Internal Organisasi	0-100	78,10	SPI Internal oleh KPK

Pada tahun 2021 terdapat perubahan metode pengukuran pada Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) dan survei internal organisasi yang menggunakan hasil pengukuran yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Berdasarkan catatan hasil evaluasi dan untuk meningkatkan kualitas tata kelola birokrasi serta menumbuhkan budaya integritas, kinerja dan melayani di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, berikut ini kami sampaikan beberapa hal yang perlu disempurnakan yaitu:

1. Memperkuat fungsi tim reformasi birokrasi internal, *assessor*, dan Tim Penilai Internal (TPI) dalam melakukan pemantauan dan evaluasi implementasi reformasi birokrasi pada unit kerja serta memastikan adanya tindak lanjut perbaikan;
2. Meningkatkan peran agen perubahan dalam menciptakan budaya kinerja yang cepat, adaptif, dan dinamis. Di samping itu, perubahan yang ingin diwujudkan oleh agen perubahan agar disesuaikan dengan karakter layanan utama pada masing-masing unit kerja;
3. Melakukan pemetaan terhadap seluruh produk hukum yang telah dan akan terbit, sehingga dapat diidentifikasi peraturan yang memiliki potensi tumpang tindih ataupun menghambat proses pelayanan utama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Selanjutnya hasil identifikasi tersebut ditindaklanjuti dengan deregulasi kebijakan;
4. Menyusun langkah lanjutan dari penyederhanaan birokrasi yang telah dilakukan dengan melihat lebih detail dampak dari penyederhanaan tersebut guna memastikan bahwa penyederhanaan tersebut menjadikan birokrasi di Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dapat lebih dinamis, lincah (*agile*) dan profesional;
5. Menyusun peta proses bisnis secara menyeluruh dan melakukan evaluasi berkala. Selanjutnya perlu melakukan optimalisasi penerapan *e-government* yang terintegrasi dengan menyusun perencanaan pengembangan SPBE dengan baik serta melakukan pemantauan dan evaluasi berkala;
6. Mengoptimalkan pengelolaan sistem manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) dengan memanfaatkan seluruh hasil pemetaan talenta sebagai dasar penempatan jabatan kritikal/suksesi dalam pengisian jabatan pimpinan tinggi serta memanfaatkan hasil *assessment* pegawai belum sepenuhnya dijadikan dasar mutasi internal dan pengembangan kompetensi pegawai;
7. Menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara menyeluruh serta mengidentifikasi peluang perbaikan lain untuk memastikan terjadinya peningkatan akuntabilitas kinerja;
8. Membangun Sistem Pengendalian Internal Pemerintah lebih efektif dengan menerapkan Manajemen Risiko, sehingga dapat mengendalikan gratifikasi, benturan kepentingan, *Whistleblowing System*, dan pengaduan masyarakat secara baik, yang akhirnya dapat mewujudkan pemerintah yang akuntabel dan berintegritas; dan
9. Mengoptimalkan implementasi pelayanan publik dengan penerapan budaya pelayanan prima, melakukan inovasi layanan, serta melaksanakan monitoring dan evaluasi atas upaya-upaya yang telah dilaksanakan dan dilanjutkan dengan melakukan perbaikan secara berkelanjutan untuk memastikan adanya perbaikan kualitas pelayanan publik.

Demikian laporan hasil evaluasi atas kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Kami menghargai upaya Saudara beserta seluruh jajaran dalam melaksanakan reformasi birokrasi. Selanjutnya kami harapkan agar upaya-upaya pelaksanaan reformasi ini dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

**MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI**
TJAHJO KUMOLO